

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi dan ilmu pengetahuan secara pesat membuat perusahaan semakin mudah dalam melakukan aktivitas perusahaan. Dampak dari hal tersebut adalah semakin ketatnya persaingan antara dunia usaha dengan adanya kemudahan dalam melakukan aktivitas perusahaan.

Dengan adanya fenomena yang terjadi tersebut mengakibatkan setiap perusahaan yang bergerak di bidang jasa maupun manufaktur bersaing untuk menciptakan inovasi baru terhadap barang atau jasa agar memiliki nilai tambahan dengan menghasilkan barang yang berkualitas baik dengan harga yang bersaing.

Agar perusahaan menghasilkan barang dengan kualitas yang baik, diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas dalam memimpin perusahaan. Seorang pemimpin atau manajer dituntut untuk dapat melakukan efisiensi di segala bidang dengan menjalankan fungsi dari manajemen agar sesuai dengan tujuan perusahaan.

Perkembangan teknologi juga memberi dampak yang positif bagi manajer untuk dapat mengambil keputusan secara tepat sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai dengan efektif.

Manajemen Perusahaan memiliki beberapa fungsi yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengendalian. Salah satu fungsi manajemen yaitu *control*. Kegiatan pengendalian ini mencakup pengendalian secara langsung dan pengendalian secara tidak langsung.

Menurut **Waluya S.P. Hasibuan (2001)** :

“Pengendalian secara langsung dilakukan terhadap kegiatan (action) yang sedang dilakukan sedangkan pengendalian tidak langsung dilakukan terhadap evaluasi pelaporan kinerja (performance evaluation) yang telah dilakukan. Fungsi pengendalian perlu dikuasai dan dilaksanakan oleh setiap tingkat manajemen pada suatu perusahaan agar tujuan perusahaan berjalan efektif.”

Salah satu alat bantu bagi manajemen untuk meningkatkan efektivitas pengendalian kinerja manajer perusahaan adalah dengan melaksanakan akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban (*Responsibility Accounting*) merupakan salah satu bagian dari sistem pengendalian manajemen yang dapat mengukur dan mengevaluasi suatu anggaran dan realisasinya.

Dalam akuntansi pertanggungjawaban, terdapat informasi biaya yang direncanakan untuk masing masing pusat pertanggungjawaban dalam bentuk laporan yang bersifat objektif, relevan, dan tepat waktu. Informasi tersebut akan membantu manajer menilai kinerja setiap pusat pertanggung jawaban. Apabila terdapat penyimpangan, maka dapat dilakukan koreksi dan evaluasi atas kegiatan tersebut agar kinerja pusat pertanggungjawaban menjadi lebih efektif dan efisien.

Menurut **Juaniva Sidharta (2004)** :

“Pelaksanaan akuntansi pertanggungjawaban yang baik akan membantu manajemen perusahaan untuk menilai kinerja dari setiap pusat pertanggung jawaban dalam rangka pengambilan keputusan dan mencapai tujuan perusahaan secara menyeluruh.”

Pengertian akuntansi pertanggungjawaban menurut **Hansen & Mowen (2005:116)** adalah sebagai berikut :

”Akuntansi pertanggungjawaban adalah sistem yang mengukur berbagai hasil yang dicapai oleh setiap pusat pertanggungjawaban menurut informasi yang dibutuhkan oleh para manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawaban mereka.”

Sedangkan untuk melakukan sistem akuntansi pertanggungjawaban, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Terdapat struktur organisasi dengan *job description* yang jelas serta adanya identifikasi pusat pertanggung jawaban yang dipimpin oleh manajer.
2. Adanya pemisahan antara biaya terkendali dan biaya tidak terkendali.
3. Adanya anggaran yang disusun oleh setiap bagian pusat pertanggung jawaban.
4. Adanya sistem pelaporan biaya dan susunan kode rekening perusahaan yang dikaitkan dengan kewenangan pengendalian pusat pertanggungjawaban.

(Mulyadi , 2001)

Semakin besar perusahaan, maka semakin kompleks aktivitas dari perusahaan tersebut. Dalam situasi yang demikian, diperlukan perencanaan terhadap biaya-biaya secara efektif. Akuntansi pertanggungjawaban diperlukan untuk dapat mengendalikan biaya-biaya tersebut, dengan menyelenggarakan suatu sistem pencatatan atas biaya-biaya. Dari sistem pencatatan tersebut, dihasilkan laporan biaya yang menunjukkan setiap manajer bertanggung jawab atas pengeluaran biaya-

biaya yang terjadi pada unit organisasi. Dengan adanya laporan tersebut, kinerja manajer masing masing unit organisasi dapat dinilai dan dievaluasi.

Dilihat dari hubungan antara masukan dan keluaran, pusat biaya dibagi dua macam, yaitu :

1. Pusat biaya teknis, adalah pusat biaya yang sebagian besar masukannya mempunyai hubungan yang jelas dengan keluarannya. Contohnya : Biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung.
2. Pusat Biaya Kebijakan, adalah pusat biaya yang sebagian besar masukannya tidak mempunyai hubungan yang jelas dengan keluarannya. Contohnya : pusat biaya yang meliputi unit unit administratif dan pendukung (akuntansi, hukum, hubungan masyarakat, dan sumber daya manusia) (**Haninum : 2003**)

Biaya pemeliharaan dan perbaikan dapat dikategorikan sebagai pusat biaya kebijakan, karena secara langsung merupakan bagian dari unit administratif dan sifatnya sebagai penunjang kegiatan perusahaan. Pengendalian biaya pemeliharaan dan perbaikan dalam perusahaan dapat berjalan efektif apabila output yang dihasilkan sesuai dengan tujuan perusahaan dan sesuai dengan anggaran yang telah diteapkan oleh perusahaan.

Pemeliharaan merupakan fungsi dalam suatu perusahaan yang mempunyai peranan yang penting dalam menunjang operasi perusahaan. Pemeliharaan yang baik dapat menjamin bahwa fasilitas produksi akan dapat beroperasi secara efektif.

Anggaran biaya pemeliharaan dan perbaikan merupakan alat untuk menilai kinerja pusat biaya yang ada di dalam perusahaan, dan dijabarkan dalam struktur

organisasi. Adapun cara untuk melihat penilaian anggaran adalah dengan membandingkan anggaran dengan realisasinya, sehingga dapat diketahui efektivitas kinerja manajer pusat biaya tersebut.

Dalam kegiatan perusahaan, diperlukan adanya pengendalian atas biaya-biaya agar aktivitas perusahaan berjalan secara efektif dan efisien. Dalam hali ini, yang menjadi bagian yang diperhatikan oleh peneliti adalah pusat biaya, mengingat biaya pemeliharaan dan perbaikan harus sesuai dengan anggaran dan direalisasikan secara efektif. Penelitian ini difokuskan pada bagian biaya pemeliharaan dan perbaikan asset. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peranan Akuntansi Pertanggungjawaban Terhadap Peningkatan Keefektifan Pengendalian Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan Asset.”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Apakah penerapan akuntansi pertanggung jawaban yang baik dapat mempengaruhi peningkatan keefektifan pengendalian biaya pemeliharaan dan perbaikan asset.
2. Seberapa besarkah pengaruh penerapan akuntansi pertanggungjawaban yang baik terhadap peningkatan keefektifan pengendalian biaya pemeliharaan dan perbaikan asset.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah diidentifikasi, maka tujuan yang hendak dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah penerapan akuntansi pertanggung jawaban berpengaruh positif terhadap peningkatan keefektifan pengendalian biaya pemeliharaan dan perbaikan asset.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara akuntansi pertanggungjawaban terhadap peningkatan keefektifan pengendalian biaya pemeliharaan dan perbaikan asset.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil perolehan penelitian dari karya tulis ini, diharapkan akan memberikan Informasi berguna dan akurat yang dapat bermanfaat:

1. Bagi Penulis

Dengan melakukan penelitian ini, penulis akan dapat lebih memahami penerapan teori-teori dan konsep-konsep mata kuliah yang telah ditempuh selama di bangku kuliah serta dalam praktek-praktek lapanganya, terutama yang berhubungan dengan judul karya tulis yang penulis teliti.

2. Bagi Perusahaan

Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan untuk melaksanakan kegiatan pengendalian terhadap biaya pemeliharaan an perbaikan asset, agar dilakukan secara efektif dalam upaya untuk meningkatkan kinerja pada pusat-pusat pertanggung jawaban .

3. Pihak lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menunjang penambahan informasi yang dibutuhkan oleh para pembaca dan dapat dijadikan sebagai landasan pemikiran untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan cakupan yang lebih luas dan spesifik.

1.5 Kerangka Pemikiran

Dalam perusahaan yang semakin besar operasinya maka masalah yang muncul di dalamnya akan semakin kompleks, pimpinan yang semula dapat mengadakan pengawasan secara langsung di setiap tahapan kegiatan operasi perusahaan, tidak lagi dapat dilakukan sepenuhnya. Oleh karena itu manajemen memerlukan suatu alat bantu pengendalian terhadap kegiatan yang dilakukan oleh bawahannya. Untuk melakukan aktivitas perusahaan diperlukan manajer yang bertanggungjawab terhadap segala sesuatu yang telah menjadi tanggungjawabnya menurut struktur organisasi yang ada pada perusahaan tersebut.

Pada perusahaan yang relatif besar perlu menerapkan akuntansi pertanggungjawaban karena perusahaan semacam ini pada umumnya menetapkan pembagian unit-unit organisasi dengan pelimpahan wewenang dan tanggung jawab secara jelas dan tegas.

Akuntansi pertanggungjawaban merupakan alat yang dipakai untuk mengendalikan biaya, karena dalam akuntansi pertanggungjawaban biaya-biaya diakumulasikan dan dilaporkan dalam suatu pusat pertanggungjawaban tertentu.

Pengertian akuntansi pertanggungjawaban menurut **Hansen & Mowen (2005:116)** adalah sebagai berikut :

”Akuntansi pertanggungjawaban adalah sistem yang mengukur berbagai hasil yang dicapai oleh setiap pusat pertanggungjawaban menurut informasi yang dibutuhkan oleh para manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawaban mereka.”

Pengertian akuntansi pertanggungjawaban menurut **L.M Samryn,SE (2001:256)** :

“Akuntansi pertanggungjawaban merupakan suatu sistem akuntansi yang digunakan untuk mengukur kinerja setiap pertanggungjawaban sesuai dengan informasi yang dibutuhkan manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawaban mereka sebagai bagian dari sistem pengendalian manajemen”.

Sedangkan menurut **Mulyadi (2001)** dikemukakan:

“Akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu sistem yang disusun sedemikian rupa sehingga pengumpulan dan pelaporan biaya dan penghasilan dilakukan dengan bidang pertanggungjawaban dalam organisasi dengan tujuan agar dapat ditunjuk orang atau kelompok yang bertanggungjawab terhadap penyimpangan dari biaya dan penghasilan yang dianggarkan”.

Dari pengertian di atas Mulyadi menyimpulkan bahwa syarat untuk dapat menerapkan akuntansi pertanggungjawaban :

1. Struktur organisasi

Dalam akuntansi pertanggungjawaban struktur organisasi harus menggambarkan aliran tanggungjawab, wewenang dan posisi yang jelas untuk setiap unit kerja dari setiap tingkat manajemen selain itu harus menggambarkan pembagian tugas dengan jelas pula. Dimana organisasi harus disusun sedemikian rupa sehingga wewenang dan tanggungjawab tiap pimpinan jelas. Dengan demikian wewenang mengalir dari tingkat manajemen atas ke bawah, sedangkan tanggungjawab adalah sebaliknya.

2. Anggaran

Dalam akuntansi pertanggungjawaban setiap pusat pertanggungjawaban harus ikut serta dalam penyusunan anggaran karena anggaran merupakan gambaran rencana kerja para manajer yang akan dilaksanakan dan sebagai dasar dalam penilaian kerjanya. Diikuti sertakannya semua manajer dalam penyusunan.

3. Penggolongan Biaya

Karena tidak semua biaya yang terjadi dalam suatu bagian dapat dikendalikan oleh manajer, maka hanya biaya-biaya terkendalikan yang harus dipertanggungjawabkan olehnya. Pemisahan biaya kedalam biaya terkendalikan dan biaya tak terkendalikan perlu dilakukan dalam akuntansi pertanggungjawaban.

a. Biaya terkendalikan adalah biaya yang dapat secara langsung dipengaruhi oleh manajer dalam jangka waktu tertentu.

b. Biaya tidak terkendalikan adalah biaya yang tidak memerlukan keputusan dan pertimbangan manajer karena hal ini tidak dapat mempengaruhi biaya karena biaya ini diabaikan.

4. Sistem akuntansi biaya

Oleh karena biaya yang terjadi akan dikumpulkan untuk setiap tingkatan manajer maka biaya harus digolongkan dan diberi kode sesuai dengan tingkatan manajemen yang terdapat dalam struktur organisasi. Setiap tingkatan manajemen merupakan pusat biaya dan akan dibebani dengan biaya-biaya yang terjadi didalamnya yang dipisahkan antara biaya terkendalikan dengan biaya tidak terkendalikan. Kode perkiraan diperlukan untuk mengklasifikasikan perkiraan-perkiraan baik dalam neraca maupun dalam laporan rugi laba.

5. Sistem pelaporan biaya

Bagian akuntansi biaya setiap bulannya membuat laporan pertanggungjawaban untuk tiap-tiap pusat biaya. Setiap awal bulan dibuat rekapitulasi biaya atas dasar total biaya bulan lalu, yang tercantum dalam kartu biaya. Atas dasar rekapitulasi biaya disajikan laporan pertanggungjawaban biaya. Isi dari laporan pertanggungjawaban disesuaikan dengan tingkatan manajemen yang akan menerimanya. Untuk tingkatan manajemen yang terendah disajikan jenis biaya, sedangkan untuk tingkatan manajemen di atasnya disajikan total biaya, tiap pusat biaya yang dibawahnya ditambah dengan biaya-biaya yang terkendalikan dan terjadi dipusat biayanya sendiri .

Syarat-syarat utama dalam membentuk dan mempertahankan akuntansi pertanggungjawaban menurut **Matz Usry (2001;420)**, adalah sebagai berikut :

1. Akuntansi pertanggungjawaban didasarkan atas penggolongan tanggung jawab manajemen (departemen-departemen) pada semua tingkatan dalam setiap organisasi dengan tujuan membentuk anggaran bagi masing-masing departemen. Individu yang mengepalai klasifikasi pertanggungjawaban, harus bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan biaya-biaya dari kegiatannya. Konsep ini menekankan perlunya penggolongan biaya menurut biaya yang dapat atau tidak dapat dikendalikan oleh manajer departemen tersebut.
2. Titik awal dari sistem akuntansi pertanggungjawaban terletak pada bagian organisasi dimana ruang lingkup wewenang telah ditentukan. Wewenang mendasar pertanggungjawaban biaya-biaya tertentu dan dengan pertimbangan serta kerjasama biaya tersebut diajukan dalam anggaran.
3. Setiap anggaran harus secara jelas menunjukkan biaya-biaya yang dapat dikendalikan oleh orang yang bersangkutan. Bagan perkiraan harus disesuaikan supaya dapat dilakukan pencatatan atas biaya-biaya yang dapat dikendalikan atau pertanggungjawaban dalam kerangka kerja yang mencakup dalam wewenang. Dari uraian di atas dapat diambil gambaran mengenai garis besar prinsip akuntansi pertanggungjawaban yang diterapkan dalam akuntansi pertanggungjawaban dapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :
 1. Menentukan garis wewenang dan tanggungjawab secara jelas bagi setiap tingkatan manajemen.
 2. Menyusun sistem administrasi yang sesuai dengan garis wewenang dan tanggungjawab yang telah ditentukan.

3. Mencatat dan menilai pegawai sesuai dengan garis wewenang dan tanggung jawab masing-masing.

Pusat pertanggungjawaban adalah unit-unit pada sebuah organisasi yang memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang dipimpin oleh seorang manajer.

L.M. Samryn,SE (2001:259) mengartikan pusat pertanggungjawaban sebagai berikut :

” Pusat pertanggungjawaban merupakan suatu bagian dalam organisasi yang memiliki kendali atas terjadinya biaya, perolehan pendapatan, atau penggunaan dana investasi. ”

Pusat pertanggungjawaban secara umum dibagi menjadi :

1. Pusat biaya
 - a. Pusat biaya teknik
 - b. Pusat biaya kebijakan
2. Pusat pendapatan
3. Pusat laba
4. Pusat investasi

Dalam akuntansi pertanggungjawaban ini menghubungkan informasi akuntansi yang diperlukan oleh seorang manajer dengan wewenang yang dimiliki manajer tersebut. Wewenang yang dimiliki oleh seorang manajer tersebut didelegasikan dari manajer tingkat atas ke manajer yang ada

dibawahnya dan pendelegasian wewenang menuntut manajer yang ada untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya.

Dalam pengendalian kegiatan operasional perusahaan, salah satu alat ukurnya adalah anggaran. Anggaran dapat memotivasi manajer untuk mengambil tindakan perbaikan apabila terjadi penyimpangan.

Mulyadi (2001) mengungkapkan bahwa :

“Anggaran adalah suatu rencana kerja yang dinyatakan secara yang dinyatakan secara kuantitatif yang diukur dalam satuan moneter standard dan satuan ukuran lainnya, yang mencakup jangka waktu setahun.”

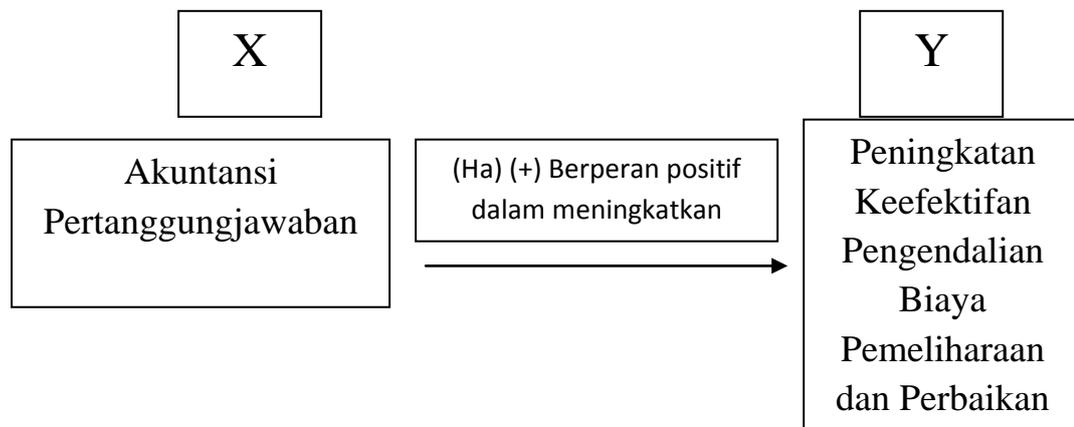
Berdasar definisi anggaran di atas, dapat disimpulkan manfaat anggaran sebagai berikut :

1. Memberikan tanggung jawab pada manajer atas perencanaan yang telah dibuat.
2. Penganggaran memberikan bayangan sebuah kerangka kerja yang relative baik untuk penilaian prestasi kerja.
3. Membantu para manajer mengkoordinasikan segala upaya demi tercapainya sasaran yang telah ditetapkan secara keseluruhan oleh perusahaan sejalan dengan sasaran yang ingin dicapai bagian bagiannya.

Berdasar uraian tersebut di atas maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

“Peranan Akuntansi Pertanggungjawaban Terhadap Peningkatan Keefektifan Pengendalian Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan Asset”

Bagan Kerangka Pemikiran



Ho: Tidak Terdapat *Pengaruh* positif dan Kuat Antara *Akuntansi Pertanggungjawaban Terhadap Keefektifan Pengendalian Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan*.

Hi: Terdapat *Pengaruh* positif dan Kuat Antara *Akuntansi Pertanggungjawaban Terhadap Keefektifan Pengendalian Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan*.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Metode Yang Digunakan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif analitis. **Moh. Nazir (1999:64)**, dalam bukunya yang berjudul *Metode Penelitian* menjelaskan bahwa metode deskriptif analitis adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diteliti.

Pendekatan yang digunakan adalah studi kasus. Studi kasus menurut **Nazir** yaitu penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau ciri khas dari keseluruhan personalitas subjek penelitian bisa berupa individu, kelompok, lembaga, maupun masyarakat. Data yang diperoleh selama penelitian akan diolah, dianalisis, dan diproses lebih lanjut dengan dasar-dasar teori yang telah dipelajari untuk kemudian ditarik kesimpulan. Hasil dari penelitian studi kasus merupakan suatu generalisasi dari pola-pola kasus yang tipikal dari individu, kelompok, serta lembaga-lembaga lainnya. Pemilihan metode studi kasus didasarkan atas pertimbangan bahwa penelitian hanya dilakukan pada satu perusahaan untuk melihat kecenderungan penelitian ini hanya berlaku pada perusahaan tersebut pada periode waktu penelitian dan tidak dapat digunakan untuk menilai keseluruhan perusahaan.

I.6.2 Jenis Data

Di dalam penelitian ini, data dan informasi yang digunakan oleh penulis yaitu:

1. Data Primer

Menurut **Nur dan Bambang** dalam bukunya *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen (1999:146)* data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab penelitian yang masih perlu diolah kembali data yang telah diperoleh tersebut agar tercapainya hasil yang akurat

2. Data Sekunder

Menurut **Nur dan Bambang** dalam bukunya *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen (1999:147)* data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung. Contohnya : Data sejarah perusahaan maupun struktur organisasi yang telah tersedia di perusahaan.

I.6.3 Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Lapangan

Yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung pada perusahaan yang bersangkutan untuk memperoleh data primer dan informasi yang dibutuhkan, dengan cara :

1. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung ke tempat yang dijadikan objek penelitian.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik untuk mengumpulkan data dengan cara menanyakan langsung kepada pihak yang berkaitan dengan penelitian.

3. Kuesioner

Kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara memberikan suatu daftar pertanyaan dalam lembaran kertas untuk dijawab oleh pihak yang berkaitan.

4. Dokumentasi

Kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara memberikan suatu daftar pertanyaan dalam lembaran kertas untuk dijawab oleh pihak yang berkaitan.

2. Studi Kepustakaan

Yaitu mencari dan mengumpulkan bahan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti untuk memperoleh data sekunder dengan membaca, mempelajari, dan mendalami literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

I.7 LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN

Lokasi dari penelitian dilakukan pada sebuah perusahaan yang ada di Bandung. Perusahaan tersebut telah terbentuk dan berkembang menjadi perusahaan yang maju.